



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri melainkan membutuhkan pendamping dalam kehidupannya untuk mencapai tujuan hidup yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Sebagaimana yang ditegaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan di jadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*”(QS. Ar-Rum : 21)

Proses untuk menadapatkan pendamping ialah melalui perkawinan yang merupakan *sunnah* Nabi SAW yang umum berlaku pada semua makhluk hidup baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Yasiin ayat 36 :

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Artinya : *“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”*(QS. Yasiin : 36)

Dari makhluk yang diciptakan Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya<sup>1</sup>. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa` ayat 1,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”(QS. An-Nisa` : 1)

Allah tidak mau menjadikan manusia itu seperti makhluk lainnya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara anarki dan tidak ada aturan. Tetapi demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, maka setiap seorang muslim yang telah mampu memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, maka dia dianjurkan untuk melangsungkan perkawinan.<sup>2</sup> Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud,

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ , وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2010), h. 12.

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: PT. Al Ma’arif, 1980), h. 7.

<sup>3</sup> Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Al-Jami’ Ash-Shahih*, (Raudhah, Maktabah Salafiyah, tt), jilid 3 h. 355.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : *Abdullah Ibnu Mas'ud Radliyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." HR. Muttafaq Alaihi."*

Kata-kata *al-baah* mengandung arti kemampuan melakukan hubungan kelamin dan kemampuan dalam biaya hidup perkawinan.<sup>4</sup> Maka berdasarkan hadits diatas dapat dilihat pentingnya perkawinan dalam Islam yang merupakan perintah agama kepada yang mampu untuk melaksanakannya. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,<sup>5</sup> juga merupakan salah satu upaya meyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sebagai sarana untuk menjamin kelangsungan hidup umat manusia di atas permukaan bumi, disamping itu perkawinan menimbulkan adanya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri.<sup>6</sup>

Perkawinan juga bisa dikatakan sebagai salah satu kebutuhan dasar bagi manusia normal. Allah SWT mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai

<sup>4</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-1, h. 44.

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan N0. 1/1974, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1983).

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 67.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah SWT.<sup>7</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 dengan tegas menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup> Selanjutnya dipertegas di dalam KHI pada pasal 3 bahwa tujuan perkawinan adalah mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh Allah.<sup>9</sup>

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat para ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa perkawinan itu adalah *sunnah*. Golongan *Zahiriyyah* berpendapat bahwa hukum perkawinan bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya perkawinan adalah wajib. Ulama *Hanafiyyah* berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adakalanya wajib bagi orang yang telah pantas untuk kawin, dan adakalanya makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinannya itu. Sedangkan Ulama lainnya berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adakalanya haram bagi orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan, dan adakalanya

<sup>7</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat*, Penerjemah: Abdul Majid Khon, (Jakarta: AMZAH, 2011), h. 39.

<sup>8</sup> Undang-Undang Perkawinan, (Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 1991), Cet. Ke-1, h. 6.

<sup>9</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tatahan Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani, 1994), Cet. Ke-1, h. 142.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mubah bagi orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk melakukan perkawinan.<sup>10</sup>

Terlepas dari polemik para Imam tentang status hukum asal perkawinan, hukum perkawinan dapat berubah sesuai kondisi dan situasinya berpulang pada hukum yang lima ( *Al-ahkamul Khamsah* ) yaitu wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah. Jadi andai kata ada orang yang dihadapkan pada perkawinan, belum tentu mereka menghukumi dengan hukum yang sama, hal ini tergantung pada bagaimana kondisi dan situasi orang tersebut.

Allah SWT memerintahkan mengawinkan orang-orang yang sendirian baik dari laki-laki maupun dari perempuan yang telah patut untuk kawin, apabila mereka ragu-ragu atau takut untuk melakukan perkawinan dikarenakan takut memikul beban berat atau miskin Allah SWT akan mengayakan mereka dengan karunianya. Sebagaimana yang di jelaskan oleh Allah dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.*” (QS. An-Nur : 32)

Perkawinan merupakan ikatan antara seorang individu dengan individu lainnya, namun dalam pelaksanaannya diperlukan peraturan-

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan yang dibuat oleh instansi yang ditunjuk berwenang membuat sebuah peraturan perundang-undangan pada bidang perkawinan yang dapat dijadikan petunjuk oleh umat Islam dan dijadikan pedoman hakim di lembaga peradilan agama dalam memeriksa dan memutuskan perkara perkawinan, baik secara resmi dinyatakan sebagai peraturan perundang-undangan negara atau tidak.

Adapun yang menjadi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan adalah UU No. 1 tahun 1974, mengenai hukum materil perkawinan. PP. No. 9 tahun 1975, menjelaskan aturan pelaksanaan dari beberapa materi UU No. 1 tahun 1974. Dan UU No. 7 tahun 1989 mengatur hukum acara atau formil dari perkawinan.<sup>11</sup>

Disamping peraturan perundang-undangan negara termasuk juga aturan atau ketentuan yang secara efektif telah dijadikan oleh hakim di Pengadilan Agama sebagai pedoman yang harus diikuti dalam penyelesaian perkara perkawinan, yaitu Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang penyebarluasannya dilakukan melalui Intruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.<sup>12</sup>

Kemudian perkawinan harus dicatat dan dilaksanakan di depan pegawai pencatat nikah, hal ini di atur dalam UU No. 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1, yang menyatakan :

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”

<sup>11</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit.*, h. 21.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Neng Djubaidah bahwa pemahaman pasal tersebut adalah:

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”<sup>13</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 pasal 5, tentang pencatan nikah, bahwa syarat administrasi yang harus dipenuhi oleh calon pengantin sebelum melangsungkan pernikahan adalah:<sup>14</sup>

- a. Surat keterangan untuk nikah dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- b. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
- c. Persetujuan kedua calon mempelai;
- d. Surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
- e. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai belum mencapai usia 21 tahun;
- f. Izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
- g. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;

<sup>13</sup> Neng Djubaedah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010) h. 207.

<sup>14</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007, Lihat. Neng Djubaidah, *Ibid.*, h. 397-398.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
- i. Putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;
- j. kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
- l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.

Setelah calon pengantin memenuhi syarat administrasi dan prosedur pernikahan di atas, suatu perkawinan baru dapat dilaksanakan, kemudian suami istri dapat memulai hidup baru sesuai yang diinginkan yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

KUA kecamatan Canduang merupakan satu dari 16 KUA kecamatan yang ada di kabupaten Agam, mulai efektif melayani masyarakat sejak tahun 2005. Ketika penulis melaksanakan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di KUA kecamatan Canduang penulis menemukan adanya perbedaan teori yang penulis pelajari selama di perkuliahan dengan praktek yang terjadi di KUA kecamatan Canduang, yaitu adanya syarat tambahan berupa surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit sebagai salah satu syarat administrasi untuk melangsungkan pernikahan,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang mana surat keterangan tersebut diserahkan sebelum akad nikah bersamaan dengan syarat-syarat lainnya yang diminta oleh pegawai KUA yang berada dibidang administrasi dan informasi. Menurut kepala KUA kecamatan Canduang, H. Basyaruddin, SH mengatakan bahwa, tujuan dari syarat tambahan berupa surat keterangan kesehatan bagi kedua calon pengantin adalah untuk mengetahui kondisi kesehatan masing-masing calon pengantin, karena di era zaman modern ini sangat banyak peluang setiap orang terkena virus *HIV/AIDS* dan penyakit menular lainnya serta penyalahgunaan narkoba. Namun ketika penulis perhatikan setiap calon pengantin hanya memeriksakan kesehatannya secara umum, dalam artian penulis tidak melihat adanya pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui apakah pasangan calon pengantin tersebut mengidap virus *HIV/AIDS* dan penyakit menular lainnya serta penyalahgunaan narkoba.

Masalah utamanya adalah bahwa syarat tambahan berupa surat keterangan kesehatan bagi calon pengantin tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Hanya saja *Imunisasi Tetanus Toxoid* yang diatur secara khusus melalui Intruksi Bersama Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Departemen Agama dan Direktur Jendral Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan Nomor 2 tahun 1989 tentang *Imunisasi Tetanus Toxoid* Calon Pengantin.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* (Jakarta : 2015) h. 730.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Berikut adalah pasangan yang menikah dan mengurus surat keterangan kesehatan sebelum akad nikah:

1. Pasangan Asmal dan Murdaningsih (menikah pada 27 Oktober 2017), menurut Asmal (suami) pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai puskesmas untuk calon pengantin pria hanya sekedar pengecekan darah, yaitu untuk mengetahui golongan darah dan melihat warna darah normal atau tidak. Kemudian pemeriksaan tekanan darah untuk mengetahui adanya penyakit atau tidak, lalu membayar administrasi Rp10.000,00 dan setelah itu baru dikeluarkan surat keterangan kesehatan.
2. Pasangan Arif Maulana dan Isra Wahyuni (menikah pada 10 Maret 2018), menurut Isra (istri) pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai puskesmas untuk calon pengantin wanita adalah pemeriksaan kehamilan dengan *Test Pack*, apakah calon pengantin perempuan hamil atau tidak, kalau negatif hamil (tidak hamil) maka dilakukan *Imunisasi Tetanus Toxoid*, kemudian membayar administrasi Rp10.000,00 dan setelah itu dikeluarkan kartu *Imunisasi Tetanus Toxoid*.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa pemeriksaan yang dilakukan puskesmas hanya sekedar pemeriksaan secara umum saja, tidak ada pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui pasangan mengidap penyakit menular atau tidak. Kedua pasangan mengaku bahwa, pemeriksaan yang dilakukan adalah untuk memenuhi prosedur

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

administrasi KUA, mereka tidak mengetahui apakah dalam tubuhnya ada penyakit menular seperti *HIV/AIDS*, Sipilis dan penggunaan narkoba.

Beranjak dari latar belakang di atas, syarat administrasi berupa surat keterangan sehat ini membuat penulis tertarik dan berkeinginan untuk mengetahui bagaimana penerapan syarat administrasi berupa surat keterangan kesehatan bagi calon pengantin di KUA kecamatan Canduang kabupaten Agam, apa urgensinya bagi calon pengantin sehingga surat keterangan sehat ini menjadi pertimbangan bagi KUA kecamatan Canduang kabupaten Agam sebagai syarat administrasi pra nikah.

Untuk itu penulis akan merealisasikannya dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul :***Implementasi Peraturan Tentang Surat Keterangan Kesehatan Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan Di KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Menurut Hukum Islam***

## B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah, maka pada pembahasan penelitian ini terfokus pada *Implementasi* Peraturan tentang Surat Keterangan Kesehatan Sebagai Syarat Administrasi Pernikahan di KUA Kecamatan Canduang Kabupaten Agam Menurut Hukum Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **C. Rumusan Masalah**

Setelah melihat uraian latar belakang di atas, dapat diarahkan pembahasan dan penelitian ini pada rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana kedudukan surat keterangan kesehatan di KUA kecamatan Canduang?
2. Bagaimana penerapan surat keterangan kesehatan pra nikah di KUA kecamatan Canduang?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penerapan surat keterangan kesehatan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Canduang?

### **D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui kedudukan surat keterangan kesehatan di KUA kecamatan Canduang.
  - b. Untuk mengetahui penerapan surat keterangan kesehatan pra nikah di KUA kecamatan Canduang .
4. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang penerapan surat keterangan kesehatan pra nikah di Kantor Urusan Agama kecamatan Canduang?
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Sebagai sumbangan pemikiran penulis dalam ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan masalah *implementasi* peraturan tentang surat keterangan kesehatan sebagai syarat administrasi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pernikahan di kua kecamatan canduang kabupaten agam menurut hukum Islam.

- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi para pembaca, khususnya bagi penulis, umumnya bagi masyarakat dan mahasiswa lainnya.
- c. Untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga UIN Suska Riau.

**E. Metodologi Penelitian**

**1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan ( *Field Research* ). Penelitian ini dilaksanakan di KUA kecamatan Canduang kabupaten Agam.

**2. Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian ini adalah kepala KUA dan pegawai dibidang Administrasi dan Informasi KUA kecamatan Canduang kabupaten Agam, calon pengantin yang menikah pada tahun 2017-2018 serta sebagai bahan pendukung yaitu kepala puskesmas kecamatan Canduang. Objek penelitian ini adalah penerapakan peraturan tentang surat keterangan kesehatan sebagai syarat administrasi di KUA kecamatan Canduang untuk melangsungkan pernikahan, berdasarkan kesepakatan pihak KUA dengan pihak puskesmas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai KUA yang berjumlah 15 orang, Kepala Puskesmas kecamatan Canduang dan pengantin yang menikah pada tahun 2017-2018 sebanyak 222 pasang (444 orang)<sup>16</sup> di KUA kecamatan Canduang, jumlah keseluruhan adalah 460 orang. Mengingat jumlahnya terlalu banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 20 % lebih kurang 95 orang, yang terdiri 90 orang responden, 4 orang pegawai KUA dan Kepala Puskesmas kecamatan Canduang sebagai informan, sehingga informasi yang dibutuhkan lebih valid dan akurat. Metode yang digunakan adalah metode *Purposive Sampling* yaitu cara pemilihan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian.

### 4. Sumber Data

Dalam pengumpulan data penulis menggunakan sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sampel yang dijadikan responden penelitian.
- b. Sumber Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari pihak-pihak terkait langsung ataupun tidak langsung dengan

---

<sup>16</sup> Daftar NTCR (Nikah Talak Cerai Ruju') di Kecamatan Canduang tahun 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian, serta literatur lain yang berhubungan dengan penelitian ini

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara adalah cara pengumpulan data dengan jalan komunikasi antara peneliti dan responden yang dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung untuk menanyakan secara lisan hal-hal yang diinginkan.<sup>17</sup>

### b. Observasi

Dalam hal ini penulis akan mencoba turun langsung ke lapangan untuk mengamati bagaimanakah prosedur-prosedur pencatatan pernikahan yang harus dilengkapi oleh pasangan calon pengantin sebelum melangsungkan akad pernikahan, seperti melengkapi syarat-syarat administrasi pernikahan terutama tentang surat keterangan calon pengantin.

### c. Angket

Angket adalah mendapatkan data dengan cara menyebarkan sejumlah daftar pertanyaan kepada calon pengantin.

## 6. Teknik Analisa data

Teknik Analisis yang penulis pergunakan adalah analisa data kualitatif yaitu data yang terkumpul lalu dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut,

<sup>17</sup> Afifi Fauzi Abbas, *Metodologi Penelitian*, (Ciputat Timur: Adelina Bersaudara, 2010),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kemudian data tersebut di uraikan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

**7. Metode Penulisan**

- a. Deduktif, Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau jeneralisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan.
- b. Induktif, Metode Induktif adalah kebalikan dari metode deduktif. Contoh-contoh kongkrit dan fakta-fakta diuraikan terlebih dahulu, baru kemudian dirumuskan menjadi suatu kesimpulan.
- c. Deskriptif, yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara utuh tanpa mengurangi atau menambah sedikitpun sesuai dengan keadaan sebenarnya.

**F. Sistematika Penulisan**

Agar pembahasan penelitian ini tidak keluar dari pokok pikiran dan kerangka yang telah ditentukan, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini mencakup latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II berisikan tentang gambaran umum KUA kecamatan Canduang kabupaten Agam, bab ini meliputi sejarah berdirinya KUA kecamatan, lokasi KUA kecamatan Canduang, visi dan misi KUA



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecamatan Canduang, program kerja, struktur organisasi, dan prosedur pernikahan di KUA kecamatan Canduang.

Bab III mengungkapkan tinjauan tentang syarat administrasi pernikahan dan urgensi kesehatan dalam membina rumah tangga, yang mencakup syarat pernikahan, prosedur dan administrasi pernikahan, tinjauan tentang kesehatan dan urgensi kesehatan dalam membina rumah tangga.

Bab IV membahas tentang penerapan peraturan tentang surat keterangan kesehatan sebagai syarat administrasi pernikahan di KUA kecamatan Canduang yang berisikan kedudukan surat keterangan kesehatan di KUA kecamatan Canduang, penerapan surat keterangan kesehatan pra nikah di KUA kecamatan Canduang, pandangan hukum Islam tentang penerapan surat keterangan kesehatan pra nikah di Kantor Urusan Agama.

Bab V berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya disertai dengan beberapa saran-saran.